

Judul : Roda Legislasi. Tak ada lagi fit & proper test direksi dalam RUU BUMN
Tanggal : Senin, 28 Januari 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Roda Legislasi

Tak Ada Lagi Fit & Proper Test Direksi Dalam RUU BUMN



Darmadi Duriyanto

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Duriyanto memastikan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN tidak akan melebar sampai ke fit and proper test direksi dan komisaris di Senayan. Pembahasan hanya diarahkan untuk penguatan pengawasan dan tata kelola BUMN. Tujuannya, agar perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut lebih transparan.

"RUU BUMN masih dalam tahap pembahasan bersama Pemerintah. Semangat pembahasan RUU ini adalah pengawasan pada tata kelola BUMN. Pengawasannya biar lebih ketat. Porsi pengawasan oleh DPR dinaikkan. Artinya, dalam beberapa pasal memang ada wewenang DPR yang perlu diperkuat," katanya, kemarin.

Salah satu kewenangan DPR yang akan diperkuat adalah pelibatan dalam penunjukan direksi dan komisaris di BUMN. Namun, pelibatan tersebut bukan berarti cawe-cawe dan ikut mengetes. Dalam pelaksanaannya, Kementerian BUMN cukup memberitahu DPR soal adanya penggantian direksi dan komisaris BUMN.

"Di draf awal itu, memang ada usulan agar fit dan proper test dilakukan di DPR. Tapi, DPR menyadari itu tidak mungkin. Karena itu, Pemerintah cukup memberitahukan saja alasan penggantian dan penunjukan direksi dan komisaris," paparnya.

Tidak adanya fit and proper test tersebut dikarenakan jumlah BUMN sangat banyak. Mencapai 108. Jika DPR sampai ikut mengetes calon direksi dan komisaris, Darmadi khawatir hal itu malah merepotkan para anggota Dewan. Padahal, tugas DPR masih sangat banyak. Baik menyangkut legislasi, penganggaran, maupun pengawasan kinerja Pemerintah.

"Jadi, cukup diberitahukan alasan menunjuk direksi dan komisaris yang baru. Dengan begitu, misalnya, kalau ada yang aneh-aneh, kami bisa panggil untuk verifikasi. Misal, Pemerintah menunjuk direksi A. Ya kami cek alasannya apa? Masuk akal enggak. Jadi diberitahukan ke DPR. Jangan tiba-tiba ganti begitu saja tanpa pemberitahuan ke kami. Yang penting alasan penunjukannya clear dan transparan bahwa itu tidak berbau kepentingan tertentu," katanya.

Darmadi kemudian memaparkan awal mula munculnya ide DPR ikut dalam penunjukan direksi dan komisaris BUMN. Hal itu terjadi karena DPR melihat bahwa rekrutmen direksi dan komisaris BUMN kurang transparan. Bahkan ada tuduhan perusahaan pelat merah diisi tim sukses.

Namun, karena pekerjaan DPR juga banyak, keinginan itu dibatalkan. "DPR ini kerjanya bukan cuma fit dan proper test saja. Kalau semua harus dilakukan fit dan proper test di DPR, nanti fungsi pengawasan dan legislasi kita bisa hilang semua. Jadi tidak mungkin," tambah dia. ■ KAL